

ANALISIS PUTUSAN TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:
NURUL INAYAH, S.H.
17203010010

PEMBIMBING:
DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Dualisme aturan hukum antara pencatatan perkawinan dan kebolehan pengajuan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hukum perkawinan Indoonesia telah menimbulkan berbagai problematika di masyarakat, salah satunya adalah maraknya pengajuan isbat nikah poligami. Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr merupakan salah satu contoh putusan terkait permohonan isbat nikah poligami tersebut. Menariknya kedua putusan tersebut diajukan oleh Para Pemohon yang keduanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima memutuskan menolak perkara tersebut, namun Majelis Hakim Pangadilan Tinggi Agama Mataram memutuskan sebaliknya, yakni mengabulkannya. Melihat perbedaan tersebut, dalam Penelitian ini Peneliti mengkaji bagaimana Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm. jo. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr menurut perspektif yuridis dan masalah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir deduktif. Dalam pengumpulan data Peneliti menggunakan metode dokumentasi dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian terhadap Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm. jo. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr menurut perspektif yuridis disimpulkan bahwa *Pertama*, ditinjau dari Aspek Formal mengandung beberapa kecacatan, yaitu kedua putusan tersebut hanya menggunakan satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat, surat pernyataan surat pernyataan Termohon dibuat di bawah ancaman Pemohon I, sehingga berdasarkan aturan KUHPdata tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm ditemukan banyak kesalahan/kekeliruan pengetikan. *Kedua*, ditinjau dari Aspek Material disimpulkan tiga hal, yaitu pengajuan permohonan isbat nikah poligami telah bertentangan dengan aturan hukum poligami yang berlaku, kedua Majelis Hakim telah melakukan penemuan hukum, karena ketika mengadili perkara tersebut belum ada dasar hukum mengatur tentang isbat nikah poligami, dan secara yuridis kedua putusan tersebut telah memuat pertimbangan dasar hukum yang cukup. *Ketiga*, ditinjau dari Filosofis Penjatuhan Putusan, dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami telah bertentangan dengan filosofis lahirnya aturan poligami *Keempat*, ditinjau dari Aspek Penalaran hukum disimpulkan bahwa Argumentasi yang dibangun oleh kedua Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah runtut antara pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, dan konklusinya. Kedua putusan tersebut menurut perspektif masalah disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm yang menolak perkara tersebut lebih memberikan kemaslahatan bagi perkara isbat nikah poligami ke depannya, karena ia bukan merupakan satu-satunya jalan untuk memberikan kemaslahatan bagi anak yang telah lahir dalam perkawinan poligami tersebut sebagaimana yang kemudian diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami, Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm, dan Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nurul Inayah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Nurul Inayah, S.H.

NIM : 17203010010

Judul : "Analisis Putusan Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan
No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo. Putusan No.0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 April 2019 M.

12 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 2005012 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-180/Un:02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BIMA NO. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM NO.0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL INAYAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010010
Telah diujikan pada : Selasa, 30 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790103 200501 2 003

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 30 April 2019



UIN Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum
K A N

Sh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Inayah, S.H.
NIM : 17203010010
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 April 2019



Yang menyatakan,

Nurul Inayah
Nurul Inayah, S.H.
NIM. 17203010010

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

“(Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.)”

(Qs. AL-Baqarah:216)

***“KAU TAK AKAN PERNAH MAMPU MENYEBRANGI LAUTAN
SAMPAI KAU BERANI BERPISAH DENGAN DARATAN”***

(Christopher Colombus)

HALAMAN PERSEMBAHAN

TULISAN INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA ORANG-ORANG YANG SELALU MENYAYANGIKU, MENSUPPORTKU, DAN MENDOAKANKU DALAM KEADAAN APAPUN, TERKHUSUS ORANG TUAKU, ABANG & ADIK-ADIKKU, SERTA SAHABAT-SAHABATKU TERSAYANG, SEMOGA INI MENJADI LANGKAH AWAL AGAR AKU DAPAT MEMBAHAGIAKAN KALIAN SEMUANYA, AAMIIN.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	he

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *‘illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-maḏāhib*

IV. Vokal Pendek

ـِ Kasrah ditulis i

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	ā
استحسن	ditulis	<i>istiḥsān</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	ā
أنثى	ditulis	unsa
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
العلواني	ditulis	<i>al-‘Alwānī</i>
4. Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
علوم	ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	ai
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
- Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Putusan Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)” Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Peneliti sangat menyadari, bahwa ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, tesis ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. H. Fathorrahman, M.Si. selaku Sekertaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

5. Dr. Lindra Darnela, M.Hum., selaku pembimbing Tesis yang telah membantu, mengarahkan, dan mensupport Peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Drs. M.Rusli, SH./MH., dan Drs.H.M.Ijmak, SH., MH., selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara Isbat nikah poligami putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm yang telah bersedia meluangkan waktu dan keilmuannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Drs. H. Misbachul Munir, SH., Drs. H.A. Agus Bahauddun, M.Hum., dan Drs. Subuki, MH., selaku hakim yang memeriksa dan memutus perkara Isbat nikah poligami putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr yang telah bersedia meluangkan waktu dan keilmuannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kepada semua Guru, Ustaz dan Ustazah (SD, MTs, MAS) serta seluruh Dosen S1 dan S2 yang telah membekali ilmu bagi peneliti mulai dari nol sampai saat ini.
10. Kepada Ayahanda Zulkarnain dan Ibunda Yusnilawati yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi peneliti dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan peneliti, serta yang selalu mendo'akan serta memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada abang dan adik-adikku tercinta Muhammad Zamzami, Samsul Qamar, dan Muhammad Fauzan, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan perhatian untuk peneliti.
12. Kepada Sahabat Keluarga Sakinah (Uty, Fitri, Yaya, Cut, Almira, diena, Nauval, Najib, Ilham, bg Mahrus) yang selalu menjadi keluarga serta teman terbaik selama peneliti menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga.

13. Kepada Mba Cindy yang telah menjadi sahabat yang terus membantu, mendukung dan memberikan solusi dalam kesulitan-kesulitan yang peneliti alami dalam proses penyusunan tesis ini.
14. Kepada teman-teman Magister Hukum Islam angkatan 2017, khususnya teman-teman Hukum keluarga yang telah berjuang bersama peneliti dalam menuntut ilmu S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu.
15. Kepada teman-teman diskusi Rumah Hukum (mas Hendri, Inneke, Imam, Ical, Agustin, Saep, dan yang lainnya) yang telah membantu dan kebersamai dalam mencari ilmu di kota istimewa ini, Yogyakarta;
16. Kepada temen-teman Aceh-Yogyakarata (kak fata, dk ridha, kak nurul, icut, dk fanni, dan yang lainnya) yang selalu memberikan bantuan, motivasi, masukan dan kritik-kritik yang membangun kepada Peneliti sampai menyelesaikan Tesis ini;
17. Kepada teman-teman organisasi yang pernah peneliti ikuti, seperti PSKH, PERMATA, KOMNAD yang telah menjadi teman yang selalu menerima, membantu dan menemani peneliti dalam menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin...

Yogyakarta, 18 April 2019 M

12 Sya'ban 1440 H

Peneliti,

Nurul Inayah, S.H.

NIM. 17203010010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II ISBAT NIKAH, POLIGAMI, DAN PROBLEMATIKANYA

A. Dualisme Hukum Administrasi Perkawinan: Antara Pencatatan Perkawinan dan Isbat Nikah	27
B. Problematika Isbat Nikah Poligami Di Indonesia	37
C. Kajian Hukum Tentang Putusan Hakim	46

**BAB III PUTUSAN NO. 0663/PDT.G/2014/PA.BM. JO. PUTUSAN
NO. 0093/PDT.G/2014/PTA.MTR TENTANG ISBAT
NIKAH POLIGAMI**

A. Deskripsi Kasus	53
B. Dasar Hukum/Pembuktian Dalam Persidangan.....	55
C. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan.....	59

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO. 0663/PDT.G/2014/PA.BM. JO.
NO. 0093/PDT.G/2014/PTA.MTR TENTANG ISBAT
NIKAH POLIGAMI**

A. Kualitas Hakim dalam Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/ PTA.Mtr tentang Isbat Nikah Poligami Menurut Perspektif Yuridis	73
B. Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tentang Isbat Nikah Poligami Menurut Perspektif Masalahah.....	101

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	109
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, problematika hukum yang terjadi di masyarakat semakin banyak dan beragam, termasuk dalam hukum perkawinan Indonesia. Hukum perkawinan Indonesia telah mengatur hal-hal terkait perkawinan secara teratur. Akan tetapi, dikarenakan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan aturan yang ada tidak dapat mengakomodir kebutuhan hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan problematika hukum yang terjadi di masyarakat. Salah satu hal yang masih menjadi polemik dalam masyarakat Indonesia adalah terkait isbat nikah poligami.

Isbat nikah poligami adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah poligami. Isbat nikah poligami menjadi polemik awal mulanya karena adanya dualisme hukum antara aturan pencatatan perkawinan dan kebolehan pengajuan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI telah mengatur tentang alasan diperbolehkannya mengajukan isbat nikah, namun dalam praktiknya pasal tersebut menjadi pasal karet terhadap penerapan aturan pencatatan nikah.

Pasal tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pelaku poligami liar untuk ikut mengajukan permohonan isbat nikah. Permohonan tersebut diajukan dengan alasan perkawinan poligaminya tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi ketentuan hukum Islam sehingga telah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu, pasal tersebut juga digunakan sebagai dalih agar anak yang telah lahir dalam perkawinan poligami tersebut mendapatkan kemaslahatan dan hak-haknya demi memperoleh isbat nikah terhadap perkawinan poligami *sirri* para pelaku.

Pengajuan permohonan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama telah mencederai aturan poligami sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu dikarenakan berdasarkan aturan tersebut setiap perkawinan poligami harus mendapatkan persetujuan dari isteri terdahulu dan izin Pengadilan Agama. Akan tetapi, dalam praktiknya di masyarakat ditemukan banyak perkawinan poligami yang tidak mendapatkan persetujuan dari isteri terdahulu dan izin Pengadilan Agama yang kemudian dilakukan secara *sirri* (tidak dicatatkan). Maraknya perkawinan poligami *sirri* menimbulkan berbagai problematika baru dalam masyarakat, salah satunya adalah tidak adanya jaminan perlindungan serta status hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.¹

¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 226.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa satu-satunya jalan untuk melindungi nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami *sirri* tersebut adalah dengan pengajuan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama.² Anggapan inilah yang kemudian menjadi penyebab maraknya pengajuan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama di Indonesia.³ Pengajuan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama oleh para pelaku poligami *sirri* tersebut dikarenakan adanya keadaan yang mendesak para pelaku untuk memenuhi kepentingannya, seperti kepentingan untuk segera mengurus akta kelahiran anak dan lain sebagainya.⁴ Peneliti berargumen bahwa praktik tersebut tentu telah melanggar dan mempermainkan aturan poligami yang berlaku. Maraknya pengajuan permohonan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama di Indonesia merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum poligami yang berlaku.

Adapun salah satu contoh pengajuan perkara isbat nikah poligami adalah perkara yang diajukan ke Pangadilan Agama Bima dengan register Perkara No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm. Perkara tersebut diajukan sebab Pemohon I dan Pemohon II (yang kemudian disebut Para Pemohon) telah menikah Poligami

² Adnan Qohar, "Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Pada Adat Merari", dalam *Scientica: Jurnal Sosial Humaniora (Hukum, Manajemen, Psikologi, Pendidikan, Komunikasi)*, Universitas Islam Bandung, Vol. II, No. 2 (Desember 2015), hlm.45. (pp. 38-47).

³ Hal ini dibuktikan dengan beberapa putusan *isbat* nikah poligami berikut ini, yaitu putusan perkara No. 190/Pdt.G/2004/PA. Smn., No. 1512/Pdt.G/2015/PA. Smn., No. 1339/Pdt.G/2013/PA. Ngj., No. 0036//Pdt.G/2013/PA. Sit., No. 1325/Pdt.G/2013/PA. Kng., No. 306/Pdt.G/2012/PA. Prob., No. 141/Pdt.G/2013/PA. Prob., No. 445/Pdt.G/2012/PA. Mgt., No. 206/Pdt.G/2013/MS. Sgl., No. 141/Pdt.G/2015/PA. Mlg.

⁴ Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam", dalam *Religi: Jurnal Studi Islam*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang Jawa Timur, Vol. 5, No. 1 (April 2014), hlm. 47.

secara *sirri* dan telah dikaruniai dua orang anak dalam perkawinan tersebut. Pengajuan permohonan tersebut adalah upaya yang harus dilakukan oleh Para pemohon untuk mendapatkan akta nikah agar dapat mengurus akta kelahiran anak yang sudah berusia masuk sekolah. Para Pemohon dalam perkara tersebut keduanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Poligami bagi PNS telah diatur secara jelas dalam aturan perkawinan dan perceraian bagi PNS, yaitu:⁵

“(1) Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat; (2) pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat; (3) permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis; (4) dalam surat permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.”

Berdasarkan aturan tersebut dapat dipahami bahwa setiap PNS laki-laki diizinkan berpoligami apabila telah mendapatkan izin dari pejabat atau atasannya, dan PNS wanita secara mutlak tidak dibenarkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Menariknya dalam kasus tersebut, Para Pemohon telah menikah poligami secara *sirri* tanpa memenuhi ketentuan tersebut, namun dalam persidangan Para pemohon mengajukan surat persetujuan untuk mengisbatkan perkawinan poligami *sirrinya* yang dikeluarkan oleh atasan keduanya. Hal ini telah menyalahi ketentuan prosedur poligami sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 di atas.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama memutus menolak

⁵ Pasal 4 PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

permohonan tersebut. Akan tetapi, para pemohon tidak menerima putusan tersebut dan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan register perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. Berbeda dengan Majelis Hakim tingkat pertama, berdasarkan berbagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima sebelumnya dan memberikan izin untuk mengisbatkan perkawinan poligami tersebut.

Perbedaan putusan terhadap perkara yang sama tersebut salah satunya dikarenakan perbedaan pendapat kedua Majelis Hakim tentang kemaslahatan siapa yang seharusnya didahulukan dalam perkara tersebut. Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa harus melindungi Istri I (Termohon) dan anak-anaknya karena memiliki posisi lemah serta demi kemaslahatan aturan hukum tentang poligami yang berlaku.⁶ Lain halnya dengan Majelis Hakim tingkat banding yang berpendapat bahwa kemaslahatan anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan poligami *sirri* tersebut harus lebih didahulukan karena ia belum mempunyai status anak yang sah di hadapan hukum, sehingga perkara ini harus dikabulkannya agar anak-anak tersebut memperoleh status hukum dan hak-haknya.⁷ Perbedaan pendapat tersebut juga didukung dengan tidak adanya aturan tentang isbat nikah poligami ketika kedua perkara tersebut diadili dan diputus.

⁶ Hasil wawancara dengan Drs. M. Rusli, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua yang memutus perkara No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm., pada Tanggal 03 Februari 2019.

⁷ Hasil wawancara via *Whatsapp* dengan Drs. H. Misbachul Munir, SH., sebagai hakim Ketua yang memutus perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr., pada Tanggal 12 Maret 2019.

Pada putusan tersebut, baik Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding hanya mencukupkan pembuktiannya dengan keterangan para pihak dan alat bukti surat tanpa menggunakan alat bukti saksi. Kedua Majelis Hakim juga berbeda pendapat mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan tersebut. Jika memperhatikan fakta bahwa perkawinan poligami *sirri* tidak memiliki bukti autentik seperti akta nikah, maka keterangan saksi merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan kebenaran bahwa perkawinan poligami *sirri* sebelumnya sudah sesuai *syara'* atau tidak agar dapat dikabulkan isbat nikahnya. Hal itu dikarenakan sangat memungkinkan bahwa Majelis Hakim tidak dapat menemukan kebenaran terkait keabsahan perkawinan poligami *sirri* tersebut hanya berdasarkan keterangan para pihak saja sebagaimana yang terjadi dalam kasus isbat nikah poligami pada putusan No. 141/Pdt.G/2015/PA.Mlg.⁸

Berdasarkan paparan di atas, menurut Peneliti hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait perbedaan pendapat dan/atau pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bima dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memutus perkara isbat nikah poligami pada putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis penjatuan

⁸ Pada putusan tersebut hakim menemukan fakta-fakta penting terkait pernikahan poligami para pemohon melalui keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan alat bukti surat. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diketahui kebenaran terkait akad nikah poligami *sirri* yang dilakukan tidak sesuai dengan *syara'* karena ketika akad nikah dilakukan istri kedua pemohon tersebut masih dalam masa *'iddah*, kemudian diketahui pula terkait kebenaran alasan para pemohon melakukan poligami *sirri*. Berdasarkan fakta-fakta tersebut kemudian hakim Pengadilan Agama Malang menolak permohonan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi mempunyai kedudukan penting dalam proses pembuktian di persidangan untuk mengetahui kebenaran dalil permohonan pemohon dan hal-hal penting lainnya yang tidak diterangkan oleh para pemohon.

putusan, dan aspek penalaran hukum suatu putusan. Keempat aspek tersebut merupakan aspek-aspek yang digunakan oleh Komisi Yudisial untuk mengkaji kualitas hakim melalui putusan-putusannya.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti juga akan mengkaji putusan mana yang lebih maslahah terhadap perkara isbat nikah poligami dari kedua putusan tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Hakim dalam Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/ PTA.Mtr tentang Isbat Nikah Poligami Menurut Perspektif Yuridis dari Aspek Formal, Material, Filosofis Penjatuhan Putusan, dan Penalaran Hukum?
2. Bagaimana Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/ PTA.Mtr tentang Isbat Nikah Poligami Menurut Perspektif Maslahah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hakim dalam memutus sebuah putusan, khususnya dalam perkara isbat nikah poligami dalam Putusan

⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim Dalam Putusan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), diakses dari www.komisiyudisial.go.id, hlm. 4.

No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/ PTA.Mtr Menurut Perspektif Yuridis dari aspek Formal, aspek Material, aspek Filosofis Penjatuhan Putusan, dan aspek Penalaran Hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui putusan mana yang lebih besar memberikan kemaslahatan bagi pencari keadilan dan masyarakat umum dari kedua putusan tersebut.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan hukum dan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti lainnya yang mengkaji putusan hakim, khususnya terkait isbat nikah poligami. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama agar lebih berhati-hati dalam memutus suatu perkara, juga masyarakat sebagai pelaku hukum agar menjadi masyarakat yang taat hukum.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian dan kebaharuan dari penelitian ini terkait Analisis Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm. Jo. No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tentang isbat Nikah Poligami. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu terkait isbat nikah poligami.

Penelitian tentang isbat nikah poligami dari segi prosedur hakim memutus perkara yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Budiono.

Rohmat Budiono dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa isbat nikah poligami adalah perbuatan gabungan antara isbat nikah dan poligami yang belum diatur secara eksplisit dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia.¹⁰ Oleh karena tidak adanya aturan yang mengatur tentang isbat nikah poligami, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara isbat nikah poligami yang diajukan oleh para pencari keadilan, maka kepastian hukum itu diwujudkan dengan kewenangan hakim untuk menemukan hukum dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI dan pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama dan fakta-fakta dipersidangan.¹¹

Penelitian selanjutnya adalah beberapa penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami. Hakim yang mengabulkan perkara isbat nikah poligami mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan alasan demi melindungi kemaslahatan isteri dan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung Cahyono¹², Robith Muti'ul Hakim¹³, Dony Prystyantono¹⁴.

¹⁰ Rohmat Budiono, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Poligami bagi Umat Islam (Studi Analisis No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)", *Skripsi*, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015), hlm. 81.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 84.

¹² Agung Cahyono dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo mengabulkan permohonan dengan mengutamakan prinsip keabsahan perkawinan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan demi kepentingan maslahat bagi isteri dan anak

Penelitian selanjutnya adalah beberapa penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama yang menolak permohonan isbat nikah poligami. Hakim yang menolak perkara isbat nikah poligami mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan poligami yang berlaku yakni harus mendapatkan persetujuan isteri terdahulu dan izin Pengadilan Agama setempat. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Roqib¹⁵ dan Ariyanti.¹⁶

yang telah lahir dalam perkawinan poligami sirri tersebut. Adapun alasan hakim menolak permohonan isbat nikah poligami adalah karena perkara permohonan isbat nikah poligami melanggar aturan-aturan persyaratan poligami yang harus dipenuhi sehingga bertentangan dengan rumusan hukum dalam SEMA No. 7 tahun 2012 yang menyatakan “pada prinsipnya nikah sirri dapat dinisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang” dan juga bertujuan sebagai kontrol sosial agar masyarakat mematuhi aturan hukum poligami yang telah berlaku. Lihat Agung Cahyono, “Isbat Poligami Menurut Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo (Studi Komparatif Perkara No. 306/Pdt.G/2012/PA.Prob dan Perkara No. 141/Pdt.G/2013/PA.Prob), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016), hlm. 69-72.

¹³ Robith Muti’ul Hakim dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara yuridis hakim menolak atau mengabulkan permohonan pemohon dikarenakan tergantung ada atau tidaknya izin/persetujuan dari istri pertama. Hal ini dikarenakan menurut hakim jika tidak ada izin dari istri maka hal tersebut bertentangan dengan aturan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Indonesia terkait poligami. Namun secara normatif, hakim hanya menggunakan pertimbangan *maqāsid asy-syari’ah* karena tidak ada *naṣ* yang menyebutkan tentang keharusan adanya izin istri bagi laki-laki yang hendak berpoligami. Lihat Robith Muti’ul Hakim, “Isbat Nikah Poligami Sirri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA. Smn. Dan Putusan No. 1512/Pdt.P/2015/PA.Smn. Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Sleman)”, *Tesis*, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

¹⁴ Dony Prystyantono dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam mengadili Permohonan isbat nikah poligami hakim Pengadilan Agama memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah poligami merujuk kepada pemenuhan syarat-syarat poligami sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ada atau tidaknya persetujuan dari isteri terdahulu demi memberikan keadilan bagi isteri tersebut.¹⁴ Hal ini hasil penelitian Rohmat yang menyatakan pemberian kepastian hukum isbat nikah poligami haruslah mempertimbangkan kemaslahatan bagi isteri dan anak yang telah lahir dalam perkawinan poligami tersebut dengan menemukan hukum atas perkara tersebut. Lihat Dony Prystyantono, “Permohonan Isbat Nikah Terhadap Poligami Tanpa Ijin Isteri”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2011).

¹⁵ Muhammad Roqib dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa hakim juga menolak permohonan *isbat* nikah poligami karena tidak adanya izin dari isteri pertama. Akan tetapi hal yang membedakan dalam kasus putusan hakim yang diteliti oleh Roqib, isteri pertama telah mengetahui dan memberikan izin suaminya untuk menikah *sirri* dengan pemohon untuk menutup

Selanjutnya adalah penelitian yang membahas tentang putusan Pengadilan Agama tentang isbat nikah poligami PNS. Putusan pengadilan Agama tentang isbat nikah poligami bagi PNS juga diputus berbeda-beda oleh para hakim yang mengadili perkara serupa, yakni ada yang mengabulkan dan ada pula yang menolak permohonan tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian dari Fitroh Nur 'Aini Layly¹⁷ Zahratus Sofa¹⁸, Eko Permana

aib dikarenakan pemohon sudah terlanjur hamil di luar nikah, tapi isteri pertama tidak mengizinkan pernikahan poligami tersebut untuk diisbatkan untuk menjadi pernikahan yang sah di mata hukum. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Putusannya No. 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj. menolak perkara tersebut karena perkawinan poligami yang dilakukan oleh para Pemohon tidak sesuai dengan aturan poligami yang berlaku, dan tidak mendapat izin isteri terdahulu untuk mengisbatkan perkawinan tersebut. Akan tetapi Roqib tidak sependapat dengan hakim Pengadilan Agama yang memutus menolak perkara tersebut hanya melihat dari segi yuridisnya saja, menurutnya hakim perlu juga memperhatikan kemaslahatan dan hak-hak anak-anak yang telah terlanjur lahir dalam perkawinan tersebut. Lihat Muhammad Roqib, "Penolakan Ithbat Nikah Sirri Bagi Suami yang Sudah Beristeri", dalam *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 06, No. 2 (Desember 2016), hlm. 442, pp. 422-448.

¹⁶ Hakim Pengadilan Agama Bangkalan memutus menolak tiga perkara permohonan isbat nikah yakni perkara No. 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, No. 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan No. 0355/Pdt.P/2012/PA.BKL karena setelah pemeriksaan persidangan ditemukan bahwa permohonan isbat nikah tersebut diajukan atas perkawinan poligami, sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa perkara tersebut tidak dapat diajukan isbat nikah, namun seharusnya perkawinan poligami itu sebelumnya mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apabila perkara tersebut dikabulkan, maka akan mengakibatkan terjadinya penyelundupan hukum. Lihat Ariyanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Bangkalan", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya (2016), hlm. 8 Bab IV.

¹⁷ Fitroh dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa hakim pengadilan Agama Situbondo mengabulkan permohonan isbat nikah poligami yang diajukan oleh PNS dengan tujuan memberikan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan masyarakat untuk melindungi masa depan anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan poligami *sirri*. Para Pemohon sebagaimana amanat Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dengan alasan perkawinan poligami *sirri* tersebut telah sah menurut hukum Islam. Hakim juga menggunakan metode interpretasi hukum dengan mengambil langkah *contra legem* terhadap aturan izin poligami dalam Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 dan juga aturan izin poligami bagi PNS dalam Pasal 4 PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan PP No. 10 tahun 1983. Lihat Fitroh Nur 'Aini Layly, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0036/Pdt.G/2013/PA.Sit." Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Ponorogo (2015), hlm. 66.

¹⁸ Zahratus Sofa dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut ternyata menolak permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan oleh seorang PNS, meskipun dalam perkawinan tersebut juga telah dikarunia seorang anak. Alasan utama hakim menolak permohonan tersebut adalah dikarenakan perkawinan poligami tidak dilakukan sesuai

Dalimunthe¹⁹ dan Tamara Nizar Dkk²⁰. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, hakim memutuskan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami juga karena mempertimbangan kemaslahatan anak yang telah lahir dalam perkawinan poligami *sirri* tersebut, sedangkan hakim yang menolak permohonan tersebut karena perkawinan poligami tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keseluruhan penelitian tersebut telah membahas topik terkait isbat nikah poligami. Akan tetapi, obyek penelitian yang Peneliti kaji ini memuat

aturan yang ada, sehingga apabila dikabulkan akan menimbulkan maraknya perbuatan yang sama dalam masyarakat. Lihat Zahratus Sofa, “Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA. Dmk)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2018).

¹⁹ Eko Permana menyatakan bahwa alasan hakim Mahkamah Syar’iyyah Sigli menolak perkara isbat nikah poligami tersebut dikarenakan akad perkawinan poligami tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi, sehingga menurut hakim hal ini bertentangan dengan aturan hukum Islam dan juga Pasal 14 KHI tentang rukun dan syarat perkawinan, Pasal 5 UUP tentang syarat-syarat untuk berpoligami, juga Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 karena Alm. Suami Pemohon berstatus sebagai PNS. Oleh karena itu, apabila permohonan tersebut dikabulkan menurut hakim MS Sigli maka akan terjadi penyelundupan hukum dan membuka peluang untuk terjadinya penyelundupan hukum lainnya di masyarakat dan juga menimbulkan kesewenangan suami terhadap isterinya. Lihat Eko Permana Dalimunthe, “Analisis Terhadap Istbat Nikah Oleh Isteri yang DI Poligami Secara Sirri (Studi Putusan Mahkamah Syari’ah Nomor: 206/Pdt.G/2013/MS.Sgl)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2016), hlm. 84-85.

²⁰ Tamara Nizar Dkk., yang meneliti putusan yang sama dengan yang peneliti teliti, yaitu Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. Dalam tulisannya tersebut, Tamara Dkk. membandingkan 2 putusan permohonan isbat nikah poligami yang berbeda putusan akhirnya, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr yang mengabulkan permohonan tersebut dan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob. Dalam tulisan tersebut Tamara Dkk. meneliti kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan serta menolak isbat nikah bagi perkawinan poligami. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami dalam putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr adalah karena belum adanya aturan yang mengatur mengenai isbat nikah poligami, perkawinannya sudah sah menurut hukum Islam, dan demi kemaslahatan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Sedangkan dasar pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah poligami dalam putusan No. 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob adalah dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama, tidak terpenuhinya syarat untuk mengajukan isbat nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, dan agar terciptanya masyarakat yang taat hukum. Lihat Tamara Nizar, Dkk., “Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan serta Menolak Permohonan Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Poligami”, *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2017), hlm. 13-22.

kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam karena sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, yaitu pengajuan isbat nikah poligami yang dilakukan oleh pasangan yang berstatus PNS, baik suami maupun isterinya. Penelitian ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya yaitu Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr Menurut Perspektif Yuridis dari Aspek Formal, Aspek Material, Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan, dan Aspek Panalaran hukum. Keempat aspek tersebut merupakan aspek-aspek yang digunakan oleh Komisi Yudisial untuk mengkaji kualitas hakim melalui putusan-putusannya. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan mengkaji putusan mana yang lebih masalah terhadap perkara isbat nikah poligami dari kedua putusan tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Isbat nikah poligami merupakan salah satu problematika hukum yang terjadi di Indonesia sebelum dikeluarkannya SEMA No. 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan apapun. Sebelum dikeluarkannya SEMA tersebut, pengajuan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama marak diajukan oleh para pelaku poligami *sirri*, sebagaimana yang terjadi dalam putusan yang peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. penelitian ini mengkaji kedua putusan tersebut dari beberapa aspek kajian putusan yang digunakan oleh Komisi Yudisial yaitu aspek formal, aspek

material, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum. Kajian aspek formal putusan berkaitan erat dengan pemberlakuan hukum acara Pengadilan Agama, khususnya terkait proses pembuktian.

Pada pemeriksaan perkara perdata, hakim bersifat pasif dalam memeriksa pokok permohonan/gugatan yang diajukan kepadanya, namun hakim harus bersifat aktif dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang dijadikan didalilkan dalam permohonan/gugatan.²¹ Dalam perkara perdata hakim menggunakan sistem pembuktian positif (*positive wettwelijke*), yaitu pihak yang mendalilkan suatu hak harus membuktikan kebenaran dalil tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara perdata.²² Alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.²³

Dalam hukum acara perdata, fungsi alat bukti menjadi sangat penting, karena berdasarkan alat-alat bukti tersebut kemudian hakim akan mengambil keputusan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, atau akan

²¹ Tugas hakim dalam memeriksa hingga memutus suatu perkara menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 (tiga), yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir perkara. Hakim perlu mengkonstatir kebenaran peristiwa yang didalilkan dalam surat permohonan/gugatan perkara berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara perdata. Selanjutnya hakim harus melakukan pengkualifikasian, yaitu menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan menerapkan hukum pada peristiwa tersebut. Terakhir hakim harus melakukan konstituir, yaitu menetapkan hukumnya pada peristiwa yang bersangkutan melalui *amar* putusan/penetapannya berdasarkan pertimbangan yang kuat. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 123-125.

²² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ed. I, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

²³ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 284 R.Bg, Pasal 164 HIR.

mengabulkan atau menolak suatu perkara, sehingga dapat menghasilkan suatu putusan atau penetapan yang adil atau tidak adil bagi para pihak yang berperkara.²⁴ Dalam persidangan, alat bukti yang satu dengan yang lain memiliki kekuatan hukum yang berbeda, yaitu bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), bernilai dan/atau bersifat bebas, atau hanya bersifat bukti permulaan saja.²⁵ Dengan demikian batas minimal alat bukti yang harus digunakan hakim dalam memutus perkara adalah dua alat bukti bagi alat bukti yang bersifat permulaan.

Kajian aspek material berkaitan erat dengan apakah putusan hakim dapat membuktikan unsur yang didalilkan oleh para pemohon terkait yuridis hukumnya. Isbat nikah poligami sebagaimana diketahui ketika perkara ini diputus belum memiliki dasar hukum yuridis, maka dalam memutus perkara tersebut hakim harus melakukan penemuan hukum.²⁶ Menurut Ahmad Rifa'i,

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Cet. I, (Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2012), hlm. 174.

²⁵ Kekuatan suatu alat bukti dalam suatu persidangan dapat bernilai atau Alat bukti bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa apabila alat bukti tersebut memiliki kekuatan mutlak sebagai alat bukti, di antaranya adalah alat bukti akta autentik, akta bawah tangan dan akta sepihak yang diakui isi dan tanda tangannya, pengakuan murni, sumpah pemutus dan sumpah penambah. Alat bukti yang bersifat bebas adalah alat bukti saksi yang telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil. Sedangkan alat bukti yang bersifat permulaan harus ditambah dengan satu alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, alat bukti yang bersifat permulaan adalah alat bukti akta bawah tangan dan akta sepihak yang isi dan tanda tangannya tidak diakui, satu orang saksi, pengakuan bersyarat. Lihat Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm. 89-100.

²⁶ Penemuan hukum adalah proses menemukan hukum yang dilakukan hakim terhadap suatu perkara yang ditanganinya dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan, sekaligus penciptaan dan pembentukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang sudah ada dapat menjawab semua permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan istilah

penemuan hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu interpretasi, konstruksi, dan hermeneutika hukum.²⁷

Metode interpretasi adalah metode penemuan hukum dengan melakukan penafsiran terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan pada peristiwa konkret pada perkara yang sedang ditangani oleh hakim.²⁸ Metode konstruksi adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim karena adanya kekosongan hukum terhadap permasalahan yang sedang diadilinya.²⁹ Metode hermeneutika hukum yaitu metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan cara melihat peristiwa hukum maupun undang-undang, tidak hanya berdasarkan bunyi teksnya saja, namun juga mempertimbangkan hal lainnya, seperti faktor-faktor terjadi suatu peristiwa/sengketa, intervensi politik terhadap hakim dalam memutus suatu perkara, serta dampak putusan tersebut terhadap proses penegakan hukum dan keadilan dikemudian hari.³⁰

“kekosongan hukum” karena tidak adanya aturan hukum. Lihat Ahmad Rifa’i, *Penemuan Hukum oleh Hakim ...*, hlm. 57-58.

²⁷ Metode interpretasi terdiri dari 9 jenis yaitu interpretasi gramatikal, historis, sistematis/logis, teleologis/sosiologis, komparatif, futuristi/antisipatif, restriktif, eksentif, autentik, interdisipliner, dan multidisipliner. Lihat Ahmad Rifa’i, *Penemuan Hukum oleh Hakim ...*, hlm. 61-89.

²⁸ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 82.

²⁹ Penemuan hukum melalui metode konstruksi terdiri dari 4 jenis, yaitu penganalogian, argumentasi *a’contrario*, pengkonkretan hukum (*Rechtsvervijsnings*), dan fiksi hukum. Lihat Ahmad Rifa’i, *Penemuan Hukum oleh Hakim ...*, hlm. 74.

³⁰ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Vol. 2, No. 2 (Juli 2013), hlm. 197, pp. 189-202.

Kajian aspek filosofis penjatuhan putusan dapat dilihat apakah putusan tersebut telah sesuai dengan filosofis lahirnya aturan yang berkaitan dengan perkarayang diadili oleh hakim. Sedangkan kajian aspek penalaran hukum berkaitan erat dengan keruntutan nalar pikir yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Keruntutan nalar pikir seorang hakim dalam memutus suatu perkara dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang termuat dalam dokumentasi putusan. Dalam mengkaji hal tersebut maka harus menggunakan langkah-langkah proses penalaran hukum. Menurut Shidarta ada 6 langkah proses penalaran hukum yang harus dilakukan oleh hakim, yaitu:³¹

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta melalui kasus yang sedang ditangani oleh hakim untuk membentuk struktur (peta) kasus yang *riil* terjadi;
- b. Menghubungkan peta kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, agar dapat ditemukan perbuatan hukum yang relavan dengan kasus tersebut;
- c. Menyeleksi sumber dan aturan hukum yang relevan agar diketahui kebijakan yang terkandung dalam aturan tersebut, sehingga dapat dibentuk struktur (peta) aturan yang koheren;

³¹ Menurut Shidarta, penalaran hukum adalah proses berpikir secara problematis yang dilakukan oleh subjek hukum (termasuk hakim) sebagai makhluk individu dan sosial dalam ranah kebudayaannya. Dalam ranah hukum, Penalaran hukum yang digunakan oleh hakim bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas suatu putusan yang dikeluarkannya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penalaran hukum sangat berkaitan dengan tiga aspek filsafat hukum yaitu Aspek Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi. Aspek Ontologi adalah aspek yang melihat pemaknaan dari hakikat hukum yang ada. Aspek epistimologi adalah aspek yang melihat bagaimana proses atau prosedural penerapan hukum tersebut dalam suatu permasalahan di lapangan. Terakhir, aspek aksiologi adalah aspek tujuan hukum yang ingin dicapai dari dilakukannya suatu penalaran hukum, yakni agar penalaran yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Lihat Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 125 dan 157.

- d. Menghubungkan peta aturan tersebut dengan peta kasus yang sedang ditangani;
- e. Mencari alternatif penyelesaian kasus yang memungkinkan;
- f. Menetapkan alternatif yang sesuai yang diformulasikan dalam putusan akhir.

Penelitian ini juga mengkaji kedua putusan tersebut dari perspektif masalah. Kajian ini penting untuk mengetahui putusan man yang lebih memberikan masalah yang lebih besar terhadap perkara isbat nikah poligami ke depannya. Untuk mengkaji hal tersebut, peneliti menggunakan teori masalah al-Gazali. Masalah menurut Imam al-Gazali adalah suatu pernyataan demi mencapai manfaat dan menolak madharat demi memelihara dan menjaga tujuan *syara'* (yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta), sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum *syara'*.³²

Masalah dapat dijadikan suatu dalil atau sumber hukum dengan indikator apabila ia sejalan dengan aturan hukum *syara'* sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijmak, kemudian apabila terjadi kontradiksi antara dua maslahat atau maslahat dengan mafsadah menurut Imam al-Ghazali harus menggunakan prediksi mana yang lebih benar (*ghalabat al-zann*), dan masalah dapat diterima apabila bersifat *darūriyyah*, *kulliyyah* dan *qat'iyyah* atau zann tapi mendekati *qat'iyyah*.³³

³² Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali", dalam *Jurnal Tsaqafah*, UNIDA Gontor Ponorogo, Vol. 13, No. 2, (November 2017), hlm. 357, pp. 353-368.

³³ *Ibid.*, hlm. 359-360.

Al-Gazali dalam menetapkan masalah dan mafsadah sesuatu agar tidak terjadi kontradiksi antara keduanya membutuhkan bantuan tarjih. Tarjih ini dilakukan dengan menggunakan metode *ghalabat al-zann* yang terdiri dari tujuh cara yaitu *Pertama*, tarjih berdasarkan dominasi, artinya memilih salah satu yang lebih dominan antara masalah dan mafsadah. *Kedua*, tarjih berdasarkan *darūriyyāt al-khamsah* dengan menggunakan konsep *darūriyyāh*, *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah*. *Ketiga*, berdasarkan hukum taklifi. *Keempat*, berdasarkan ruang lingkup kajiannya, artinya maslahat atau mafsadah yang umum harus lebih didahulukan daripada yang khusus. *Kelima*, berdasarkan legitimasi syarak, artinya maslahat atau mafsadah ditentukan oleh syarak. *Keenam*, berdasarkan ijmak ulama, artinya berdasarkan kesepakatan para ulama terkait maslahat atau mafsadah mana yang lebih diutamakan. *Ketujuh*, berdasarkan *i'tibār al-ma'al*, artinya menilai resiko dari suatu perbuatan yang dikerjakan sehingga dapat diketahui perbuatan itu mendatangkan resiko yang mengandung maslahat atau mafsadah.³⁴

Untuk menganalisis aspek filosofis penjatuhan hukum tersebut, Peneliti menggunakan tarjih dengan metode berdasarkan ruang lingkup kajiannya dan berdasarkan *i'tibār al-ma'al* untuk menilai resiko apa yang akan ditimbulkan dari dikabulkan atau ditolaknya perkara tersebut. Tarjih berdasarkan ruang lingkup kajiannya sejalan dengan kaidah Fikiyyah tentang kemaslahatan yang umum harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus, yang berbunyi:

³⁴ *Ibid.*, hlm. 361.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة³⁵

Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan dan lebih mendahulukan kemaslahatan yang umum untuk masyarakat luas daripada kemaslahatan yang khusus demi kepentingan individual.

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan metode yang akan dipakai dalam penyusunan penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai jenis serta sifat penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)³⁶. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji dokumen putusan terkait, yaitu putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Dan Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tentang isbat nikah poligami dan wawancara mendalam kepada hakim yang menangani perkara tersebut, yaitu 2 orang hakim Pengadilan Agama Bima dan

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

³⁶ Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Lihat Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

3 orang hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada saat perkara tersebut diputus.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini bersifat Preskriptif-analitik. Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan serta menilai putusan tersebut berdasarkan data yang didapatkan dari dokumentasi dan hasil wawancara dengan hakim-hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, yaitu 2 orang hakim Pengadilan Agama Bima dan 3 orang hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada saat perkara tersebut di putus.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan dua sumber data penting, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data Primer penelitian ini diperoleh dari Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No.0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, serta hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa aturan Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, KHI, dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS), Buku Pedoman Administrasi Perkara Peradilan Agama, Jurnal dan juga karya ilmiah yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data dari Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA. Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tentang isbat Nikah Poligami.

b. Wawancara mendalam³⁷

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan hakim-hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, yaitu 2 orang hakim Pengadilan Agama Bima dan 3 orang hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada saat perkara tersebut di putus.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).³⁸ Pendekatan Kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan

³⁷ Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian dan atau kegiatan subyek penelitian baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data. Lihat Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung; PT Refika Aditama, 2012), hlm. 213.

³⁸ Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji suatu kasus/permasalahan hukum. Dalam pendekatan kasus, *ratio decidendi* (pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu kasus/perkara) merupakan hal yang paling penting untuk dipahami oleh peneliti. Menurut Goodheart, fakta materiel (beruoa orang, tempat, waktu dan hal lain yang berkaitan) dalam persidangan merupakan kunci untuk mengetahui *ratio decendi* yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 158.

hukum tetap.³⁹ Pendekatan ini dalam penelitian ini digunakan untuk melihat secara menyeluruh mengenai tinjauan aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum yang merujuk pada pertimbangan-pertimbangan (*ratio decendi*) digunakan hakim dalam Putusan pada Perkara No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tentang isbat nikah poligami.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir induktif.⁴⁰ Analisis data bersifat kualitatif dipergunakan untuk mengkaji data primer dan sekunder penelitian. Analisis data yang bersifat deskriptif digunakan dalam menganalisis tinjauan aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum yang digunakan hakim dalam putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA. Bm Jo Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr tentang isbat Nikah Poligami. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yakni menguraikan fakta-fakta khusus yang terjadi kemudian baru menarik kesimpulan secara umum (generalisir).

³⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

⁴⁰ *Kualitatif*, yaitu suatu upaya yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu peristiwa dan aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia baik secara individu maupun kelompok yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati. *Deskriptif*, yaitu analisa data yang ditemukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang ada melalui kumpulan dokumen yang diteliti dengan cermat dan teliti, serta pemikiran yang kritis. Lihat M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 13.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dalam memahami penelitian ini, penyusun membuat sistematika pembahasan penelitian yang terbagi dalam lima bab, dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang merupakan panduan/ acuan dari penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini sangat penting untuk memahami tentang kerangka berpikir peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Pada bab kedua, melanjutkan kerangka berpikir yang telah dibentuk pada bab pertama, pada bab ini peneliti membahas tentang tinjauan umum terkait Pencatatan Perkawinan, isbat Nikah, Poligami, Problematika isbat Nikah Poligami di Indonesia, serta Kajian Hukum tentang Putusan Hakim. Pembahasan ini perlu dibahas dalam penelitian ini mengingat hal-hal tersebut sangat perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menganalisis Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No.0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tentang Isbat Nikah Poligami.

Selanjutnya pada bab ketiga peneliti menguraikan data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi putusan terkait serta hasil wawancara yang telah dilakukan dengan hakim yang memutus perkara tersebut yaitu Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No.0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

tentang Isbat Nikah Poligami. Pada bab ini pemaparan data tersebut meliputi duduk perkara, dasar putusan hakim, dan pertimbangan hakim. Hal-hal terkait putusan tersebut sangat perlu dimasukkan dalam sistematika penelitian ini dikarenakan hal-hal tersebut merupakan data penting yang nantinya akan dianalisis dalam bab selanjutnya.

Pada bab selanjutnya yaitu bab keempat merupakan pembahasan inti mengenai hasil penelitian terkait kualitas hakim dalam Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm Jo Putusan No.0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tentang Isbat Nikah Poligami menurut perspektif yuridis dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis, dan aspek penalaran hukum serta kajian kedua putusan tersebut menurut perspektif masalah.

Terakhir adalah bab kelima yang merupakan pembahasan penutup dari rangkaian hasil penelitian ini. Pembahasan penutup tersebut terdiri dari Kesimpulan akhir yang diperoleh penyusun setelah mengkaji, mencermati dan memahami dari hasil penelitian, serta beberapa rekomendasi/saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah Peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka Peneliti menyimpulkan 4 hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kualitas hakim dalam Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tentang isbat nikah poligami menurut perspektif yuridis disimpulkan; *Pertama*, dari Aspek Formal mengandung tiga kecacatan, yaitu kedua putusan tersebut hanya menggunakan satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat, surat pernyataan yang dibuat Termohon dibuat di bawah ancaman Pemohon I, sehingga berdasarkan aturan KUHPdata tidak mempunyai kekuatan hukum, namun nyatanya Majelis hakim tingkat banding dalam putusannya justru menggunakannya sebagai salah satu acuan untuk memutus perkara tersebut, pada Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm ditemukan banyak kesalahan/kekeliruan pengetikan, yaitu kesalahan pengetikan nomor surat, tanggal surat, dan kekeliruan penulisan aturan yang dijadikan dasar penjatuhan putusan tersebut.

Kedua, dari Aspek Material disimpulkan tiga hal, yaitu kedua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut mengakui bahwa pengajuan isbat nikah poligami bertentangan dengan aturan prosedur poligami yang berlaku, khususnya aturan poligami bagi PNS karena Para Pemohon

berstatus sebagai PNS. Hal itu yang kemudian salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menolak perkara tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding justru mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengabulkan perkara tersebut demi memberikan kemaslahatan kepada semua anggota keluarga, khususnya anak yang telah lahir dalam perkawinan poligami *sirri* tersebut. Ketika perkara tersebut diadili, permohonan isbat nikah poligami belum memiliki dasar hukum yang eksplisit. Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus menolak perkara tersebut setelah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum *Argumentum a Contrario* terhadap Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding memutus mengabulkan perkara tersebut setelah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode Interpretasi Interdisipliner dengan menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum syar'i terkait hukum keabsahan perkawinan. Secara yuridis kedua putusan tersebut telah memuat pertimbangan dasar hukum yang cukup dalam memutus perkara tersebut, terutama putusan banding yang juga mengutip pendapat pakar hukum dan pakar hukum Islam.

Ketiga, dari Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan, dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami tidak sejalan dengan filosofis adanya aturan poligami di Indonesia yang bertujuan untuk menghindari dampak-dampak negatif dari tidak adanya aturan poligami. Hal itu dikarenakan

belum adanya aturan yang mengatur secara eksplisit terkait isbat nikah poligami ketika pemeriksaan perkara tersebut.

Keempat, dari Aspek Penalaran hukum kedua putusan tersebut telah diputus dengan argumentasi yang runtut dengan adanya keterkaitan antara pertimbangan fakta, pertimbangan hukum dan konklusinya, sehingga kedua putusan tersebut telah diputus dengan pertimbangan yang cukup meskipun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh kedua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut berbeda dan menghasilkan putusan yang berbeda pula. Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa perkawinan poligami *sirri* tidak dapat diisbatkan karena akan memberikan ketidakpastian hukum terhadap aturan poligami yang berlaku, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan poligami *sirri* dapat diisbatkan dalam kasus ini karena telah mendapatkan izin dari isteri I Pemohon I dan demi melindungi kemaslahatan anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut. Perbedaan pertimbangan yang digunakan oleh kedua Majelis Hakim tersebut dikarenakan perbedaan nalar berpikir dan metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tentang isbat nikah poligami menurut perspektif masalah, putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm yang menolak perkara tersebut lebih memberikan kemaslahatan bagi perkara isbat nikah poligami ke depannya

dan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan tertibnya prosedural poligami, sehingga tidak terjadinya dampak negatif poligami liar. Adapun upaya untuk mewujudkan kemaslahatan Anak dapat diajukan permohonan Penetapan Asal-Usul Anak. Hal itu sejalan dengan teori Maslahah al-Gazali dan kaidah *المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة*, menjaga masa depan aturan hukum poligami yang telah berlaku harus lebih di dahulukan karena demi memberikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak demi menghindari dampak-dampak negatif dari poligami liar daripada memberikan isbat nikah poligami hanya dengan alasan kemaslahatan anak karena kemaslahatan anak tidak hanya dapat diperoleh melalui dikabulkan isbat nikah poligami tersebut tapi juga dapat didapatkan dengan pengajuan penetapan asal usul-anak. Permohonan isbat nikah poligami baru mempunyai dasar hukum setelah dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang di dalamnya mengatur bahwa permohonan isbat nikah poligami harus dinyatakan tidak diterima meskipun diajukan dengan alasan anak, dan untuk kemaslahatan anak dapat mengajukan penetapan asal-usul anak.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat Peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti lain yang mengkaji suatu putusan jangan pernah membatasi lingkup kajian tersebut hanya pada dokumentasi putusan saja. Berdasarkan penelitian yang telah Peneliti lakukan, Peneliti memahami bahwa dalam mengkaji suatu putusan tidak dapat hanya bersumber pada putusan terkait saja karena banyak pula hal-hal penting yang tidak dicantumkan dalam putusan tersebut, dan akan lebih baik jika Peneliti tidak mampu mengakses Berita Acara Sidang terkait kasus/putusan yang dikaji. Salah satu kunci penting untuk melengkapi dan mendalami hal-hal terkait putusan tersebut adalah melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut.
2. Bagi para hakim Pengadilan Agama agar lebih berhati-hati dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara isbat nikah agar tidak terjadi penyelundupan hukum terhadap aturan poligami yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama juga diharapkan dapat mengupdate setiap perkembangan aturan hukum, sehingga permasalahan yang terjadi dimasyarakat mendapatkan penyelesaian yang terbaik.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang taat hukum, karena tujuan dibuatnya hukum tersebut dasarnya adalah demi memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi dengan masyarakat menaati hukum yang ada, maka sesungguhnya mereka telah berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004.

Maraghi, Syekh Ahmad Mustafa Al-, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, Semarang: Toha Putra, 1986.

Fikih/Hukum

Ariyanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Bangkalan", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya (2016).

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

Aulia, Hafis Anggi Altar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri menjadi Izin Poligami (Studi terhadap Putusan No. 0558/PDTG/2012/PAYK, 0004/PDTG/2013/PAYK, 0135/PDTG/2013/PAYK)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Budiono, Rohmat, "Kepastian Hukum Isbat Nikah Poligami bagi Umat Islam (Studi Analisis No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)", *Skripsi*, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015).

Cahyono, Agung, "Isbat Poligami Menurut Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo (Studi Komparatif Perkara No. 306/Pdt.G/2012/PA.Prob dan Perkara No. 141/Pdt.G/2013/PA. Prob), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

Dalimunthe, Eko Permana, "Analisis Terhadap Istbat Nikah Oleh Isteri yang DI Poligami Secara Sirri (Studi Putusan Mahkamah Syari'ah Nomor: 206/Pdt.G/2013/MS.Sgl)", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2016).

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

- Hakim, Robith Muti'ul, "Itsbat Nikah Poligami Sirri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA. Smn. Dan Putusan No. 1512/Pdt.P/2015/PA.Smn. Tentang Itsbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Sleman)", *Tesis*, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khoiri, "Analisa Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp Tentang Isbat Nikah Poligami Ditinjau Menurut Undang-Undang Perkawinan", *Skripsi*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2013).
- Layly, Fitroh Nur 'Aini, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0036/Pdt.G/2013/PA.Sit." *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Ponorogo (2015).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014).
- Maksum, Moh Ali, "Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Isteri Pertama yang sudah Meninggal tidak Menyetujui (Studi atas Putusan PA Bondowoso No: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Cet. I, (Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2012).
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nizar, Tamara, Dkk., "Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan serta Menolak Permohonan Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Poligami", *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2017).

- Prystyantono, Dony, "Permohonan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Ijin dari Isteri", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2011).
- Putra, Rekhsa Handika, "Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Kuningan (Putusan Nomor 1352/Pdt.g/2013/PA.Kng)", *Skripsi*, Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung (2018).
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ed. I, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sofa, Zahratus, "Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA. Dmk)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2018).
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Tyas, Nova Sri Wahyuning, "Itsbat Nikah Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Poligami Pengadilan Agama Mojokerto No. 0370/Pdt/G/2012/PA.Mr)", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2013).

Peraturan Perundang-Undangan

- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer).
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Reglement Buitengewesten (RBg).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Jurnal

Bafadhal, Faizah, “Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum* (Maret 2014), pp. 1-15.

Bedner, Adriaan & Stijn Van Huis, “Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslim in Indonesia: a Plea for Pragmatism”, *Utrecht Law Review*, Volume 6, Issue 2 (June 2010), hlm. 188, pp 175-191.

Fata Ahmad Khoirul & Mustofa, “Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami” dalam *Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam)*, IAIN Gorontalo, Volume 13, Nomor 2 (Desember 2013).

Ma'sum, Endang Ali, “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya”, dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 12 No. 2 (2013), pp. 201-213.

Manan, Abdul, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Vol. 2, No. 2 (Juli 2013).

Mudar, Andi Nadir, “Fenomena Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andolo)”, dalam

Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, IAIN Kendari, VOL. 4 No. 2 (Desember 2018), pp. 109-126.

Ningrum, Diah Ayu Sulistiya, “Pembuktian Anak dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-8/2010”, dalam *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum*, Universitas Gresik,, Vol. IV, No. 2 (Desember 2015), pp. 105-110.

Qohar, Adnan, “Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Pada Adat Merari”, dalam *Scientica: Jurnal Sosial Humaniora (Hukum, Manajemen, Psikologi, Pendidikan, Komunikasi)*, Universitas Islam Bandung, Vol. II, No. 2 (Desember 2015), pp. 38-47.

Roqib, Mohammad, “Penolakan Ithbat Nikah Sirri Bagi Suami yang Sudah Beristeri”, dalam *Al-Hukuma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 2 (Desember 2016), pp. 422-448.

Sakirman, “Respon Terhadap Regulasi Perkawinan Di Indonesia”, *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, STAI Darussalam Lampung, Vol.III, No.1 (2013).

Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali”, dalam *Jurnal Tsaqafah*, UNIDA Gontor Ponorogo, Vol. 13, No. 2, (November 2017), pp. 353-368.

Sodiq, Muhammad, “Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan”, dalam *Al-Ahwal: Jurnal Prodi Al-Ahwal Asy-Syahiyyah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 7, No. 2 (2014), pp. 109-120.

Sunaryo, Agus, “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)”, dalam *Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak*, STAIN Purwokerto, Vol. 5, No. 1 (Jan-Jun 2010), pp. 143-167.

Lain-Lain

Hadi, Iman, “Fungsi Saksi dalam Pembuktian Perjanjian Perkawinan”, diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 31 Maret 2019.

Hasanah, Sovia, “Apa Arti Dissenting Opinion”, diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 20 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Ijmak, SH., MH., sebagai salah satu hakim anggota yang memutus perkara No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm., pada Tanggal 15 Januari 2019.

Hasil wawancara dengan Drs. M. Rusli, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua yang memutus perkara No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm., pada Tanggal 03 Februari 2019.

Hasil wawancara via *Whatsapp* dengan Drs. H. Misbachul Munir, SH., sebagai hakim Ketua yang memutus perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr., pada Tanggal 12 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Drs. H. A. Agus Bahauddinm M.Hum., sebagai salah satu hakim anggota yang memutus perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr., pada Tanggal 21 Februari 2019.

Hasil wawancara via *Whatsapp* dengan Drs. Subuki, M.H., sebagai salah satu hakim anggota yang memutus perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Bm., pada Tanggal 09 Maret 2019.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim Dalam Putusan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), diakses dari <https://www.komisiyudisial.go.id> pada tanggal 03 Januari 2019.

Lotulung, Paulus E., “Mewujudkan Putusan Berkualitas yang mencerminkan Rasa Keadilan”, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> pada Tanggal 17 April 2019.

Pengadilan Agama Kuala Kapuas, “Sosialisasi Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan”, diakses dari <https://pa-kualakapuas.go.id> pada tanggal 30 Maret 2019.

Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung; PT Refika Aditama, 2012.

Wahyudi, Muhammad Isna, “Berbagai Argumentasi Hukum Dalam Pengesahan Nikah”, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada Tanggal 18 Maret 2019.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

BAB	Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadits, Kaidah, dan lainnya	TERJEMAHAN
I	20	35	Kaidah Fikiyyah	Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.
II	27	1	QS. Al-Baqarah (2): 282	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
III	67	29	Kitab <i>I'anatu at-Ṭalibin</i> Juz 4 halaman 254	Di dalam menda'wa telah menikah dengan seorang wanita maka harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti wali nikah dan dua orang saksi yang adil.
III	70	35	Kaidah Fikiyyah	Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
IV	77	10	Kitab <i>I'anatu at-Ṭalibin</i> Juz 4 halaman 254	Di dalam menda'wa telah menikah dengan seorang wanita maka harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti wali nikah dan dua orang saksi yang adil.
IV	89	26	Kaidah Fikiyyah	Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik

				kemaslahatan.
IV	93	31	QS. An-Nisa' (4): 59	Wahai orang-orang yang beriman! Taatillah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
IV	94	33	Kaidah Fikiyyah	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.
IV	101	36	Kaidah Fikiyyah	Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
IV	104	40	Kaidah Fikiyyah	Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
IV	107	45	Kaidah Fikiyyah	Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.

BIOGRAFI ULAMA & PAKAR HUKUM

Imam Al-Ghazali

Imam AL-Ghazali memiliki Nama lengkap adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-Thusi al-Ghazali. Beliau lahir di Desa Ghazaleh dekat Thus bagian dari kota Khurasan Iran pada Tahun 450 H/1056 M. Beliau merupakan seorang teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir, dan ahli taswuf yang dijuluki *hujjah al-Islam*. Imam AL-Ghazali memiliki banyak karya dalam banyak bidang, seperti filsafa, ilmu kala, ilmu fiqih, ushul fiqih, ilmu akhlak, tasawuf, dan ilmu tafsir. Beberapa karya beliau yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin, Tahafut al-Falasifah. Imam al-Ghazali telah mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan, menulis, dan mengajar. Beliau meninggal pada usia 54 tahun di kota kelahirannya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H/ 19 Desember 1111 M.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Beliau lahir pada tanggal 7 Desember 1924 di Surabaya. Beliau pernah mengajar di Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), di Magister Hukum Bisnis dan Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (UGM). Beliau memperoleh gelar Sarjana (tahun 1958) dan Doktor Jurusan Hukum Perdata (tahun 1971) dari UGM dan diangkat sebagai Guru Besar Emiritus pada tahun 1995. Beliau pernah bekerja di Departemen Pertanahan RI Bg V (1945-1947), pernah diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta (1966), Ketua Pengadilan Negeri Bandung (1970-1972), dan Dekan Fakultas Hukum UGM (1978-1985). Beliau menulis beberapa buku di antaranya adalah Beberapa azaz Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktek, Hukum dan Peradilan (1968), Hukum Acara Perdata Indonesia (1977), teori Hukum (2011), dll. Beliau meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2011.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

Beliau lahir di Samangambat Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1989. Pada tahun 1993-1995 beliau mendapat beasiswa S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies, kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Beliau merupakan dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun beberapa karya tulis beliau di antaranya adalah Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, dll.

Achmad Rifa'i, S.H., M.H

Beliau lahir di Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 07 Juli 1968. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Hukum UIC Jakarta Tahun 1995 dan gelar Magister dari UNIBRAW Malang pada tahun 2018. Beliau pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Kutacane, Aceh Tenggara pada Tahun 2000-2001, hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, Sumatera Barat tahun 2001-2006, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2009, hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TERKAIT PUTUSAN
NO. 0663/PDT.G/2014/PA. BM**

1. Bagaimana pendapat bapak terkait aturan *isbat* nikah terhadap aturan pencatatan perkawinan yang telah ada lebih dahulu? Dalam artian bagaimana pentingnya pencatatan nikah menurut bapak? Apakah hanya sekedar bersifat administratif saja atau merupakan satu hal yang dapat menyebabkan ketidakabsahan pernikahan apabila tidak dilakukan? Bagaimana keterkaitan/keterhubungan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), saling berkaitan atau berdiri sendiri?
2. Bagaimanakah pendapat bapak tentang *isbat* nikah poligami? Apakah ada dasar hukum yang mengatur terkait hal tersebut?
3. Menurut bapak, apakah poligami *sirri* dapat disahkan melalui *isbat* nikah (*isbat* nikah poligami) dengan merujuk kepada aturan *itsbat* nikah yang ada?
4. Dalam perkara No. 0663/Pdt.G/2014/Pa. Bm Tentang permohonan *isbat* nikah poligami, apa alasan penting bagi Majelis Hakim sehingga memutuskan untuk menolak permohonan tersebut?
5. Bagaimana pendapat bapak pribadi terkait perkara permohonan *isbat* nikah poligami tersebut?
6. Dalam perkara tersebut, bagaimanakah penafsiran bapak terhadap Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 tahun 1990 yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat”? apakah pasal tersebut berlaku mutlak beserta konsekuensi yang telah diatur?

7. Bagaimanakah keberlakuan Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 tahun 1990 terhadap poligami *sirri*? Apakah aturan tersebut berlaku ketika terjadinya akad poligami atau ketika diajukannya permohonan *isbat* nikah poligami sebagaimana yang terjadi dalam perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr.?
8. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap alat bukti surat izin *isbat* nikah poligami yang dikeluarkan oleh Para Pejabat dalam perkara tersebut?
9. Mengapa hakim tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi?
10. Menurut hakim apakah cukup untuk memutuskan perkara tersebut hanya berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti surat saja?
11. Mengapa hakim tidak mempertimbangkan status dan kemaslahatan anak dalam memutus perkara tersebut?
12. Apakah majelis hakim berbeda pendapat dalam memutus perkara tersebut?
13. Bagaimana pendapat bapak terkait aturan terbaru terkait *isbat* nikah poligami yang diatur Pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa “*isbat* nikah poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima meskipun diajukan dengan alasan anak, dan demi kemaslahatan anak dapat diajukan penetapan asal usul anak” ?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TERKAIT PUTUSAN
NO. 0093/PDT.G/2014/PTA. MTR**

1. Bagaimana pendapat bapak terkait aturan *isbat* nikah terhadap aturan pencatatan perkawinan yang telah ada lebih dahulu? Dalam artian bagaimana pentingnya pencatatan nikah menurut bapak? Apakah hanya sekedar bersifat administratif saja atau merupakan satu hal yang dapat menyebabkan ketidakabsahan pernikahan apabila tidak dilakukan? Bagaimana keterkaitan/keterhubungan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), saling berkaitan atau berdiri sendiri?
2. Bagaimanakah pendapat bapak tentang *isbat* nikah poligami? Apakah ada dasar hukum yang mengatur terkait hal tersebut?
3. Menurut bapak, apakah poligami *sirri* dapat disahkan melalui *isbat* nikah (*isbat* nikah poligami) dengan merujuk kepada aturan *itsbat* nikah yang ada?
4. Bagaimanakah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr.? Apakah hanya berdasarkan BAP dan Putusan dari PA Bima saja atau juga melakukan persidangan sebagaimana yang dilakukan di tingkat pertama dengan memeriksa para pihak serta pembuktian yang cukup?
5. Dalam perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr. Tentang permohonan *isbat* nikah poligami, apa alasan penting bagi Majelis Hakim sehingga memutus untuk mengabulkan permohonan tersebut?

6. Bagaimana pendapat bapak pribadi terkait perkara permohonan *isbat* nikah poligami tersebut?
7. Dalam perkara tersebut, bagaimanakah penafsiran bapak terhadap Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 tahun 1990 yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat”? apakah pasal tersebut berlaku mutlak beserta konsekuensi yang telah diatur?
8. Bagaimanakah keberlakuan Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 tahun 1990 terhadap poligami *sirri*? Apakah aturan tersebut berlaku ketika terjadinya akad poligami atau ketika diajukannya permohonan *isbat* nikah poligami sebagaimana yang terjadi dalam perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr.?
9. Dalam memeriksa perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr. Tersebut, bagaimanakah hakim mengetahui bahwa pihak Termohon tidak keberatan dimadu/dipoligami? Hanya berdasarkan surat keterangan/persetujuan dari Termohon yang disampaikan oleh para pemohon atau juga mendengarkan secara lisan dari Termohon dalam pemeriksaan persidangan?
10. Dalam salah satu pertimbangan yang dicantumkan oleh Majelis hakim dalam putusan dinyatakan bahwa keduanya (Para Pemohon) tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum *syar’i* maupun menurut peraturan perundang-undangan untuk berpoligami, apakah yang dimaksud oleh Majelis Hakim banding dengan “menurut perundang-undangan peraturan perundang-undangan untuk berpoligami” ?

11. Dalam perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr., bagaimanakah pertimbangan alat bukti yang digunakan oleh hakim? Apakah cukup untuk memutus perkara tersebut hanya berdasarkan keterangan para pemohon dan alat bukti surat saja? Mengapa hakim tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi? Serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap alat bukti rekomendasi surat izin itsbat nikah poligami yang dikeluarkan oleh para pejabat dalam perkara tersebut?
12. Menurut bapak, apakah rekomendasi *isbat* nikah yang dikeluarkan oleh pejabat dalam perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr. Tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada? Serta bagaimana penilaian hakim terhadap alat bukti tersebut?
13. Dalam menangani perkara No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr., mengapa majelis hakim banding tidak memutuskan menolak perkara tersebut kemudian menyarankan para pihak untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak saja jika pertimbangan utamanya adalah demi kemaslahatan anak yang telah lahir dari perkawinan poligami tersebut? Mengapa hakim lebih memilih menerima perkara tersebut, padahal ada solusi lain dan solusi tersebut dapat menjadi solusi untuk menghindari penyelundupan hukum dan poligami liar?
14. Apakah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam memutus perkara *isbat* nikah poligami tersebut?
15. Bagaimana pendapat bapak terkait aturan terbaru terkait *isbat* nikah poligami yang diatur Pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA

No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa “itsbat nikah poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima meskipun diajukan dengan alasan anak, dan demi kemaslahatan anak dapat diajukan penetapan asal usul anak” ?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. M. Rusli, SH., M.H.
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Purwakarta


Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan Tesis dengan judul “Analisis Putusan Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Terhadap Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA. Bm. Jo. Putusan No.0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr.)” dengan saudara:

Nama : Nurul Inayah, S.H.
Nim : 17203010010
Semester : IV (Empat)
Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Februari 2019

Pewawancara



Nurul Inayah, S.H.

Yang Diwawancarai



Drs. M. Rusli, SH., M.H.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. M. Ijmak, SH., MH.,
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Jember

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan Tesis dengan judul "Analisis Putusan Tentang Isbat Poligami (Studi Terhadap Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA. Bm. Jo. Putusan No.0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr.)" dengan saudara:

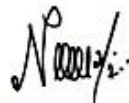
Nama : Nurul Inayah, S.H.
Nim : 17203010010
Semester : IV (Empat)
Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Februari 2019

Pewawancara

Yang Diwawancarai



Nurul Inayah, S.H.



Drs. H. M. Ijmak, SH., MH.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. Misbachul Munir, SH.

Pekerjaan : Purna. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan Tesis dengan judul "Analisis Putusan Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Terhadap Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA. Bm. Jo. Putusan No.0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr.)" dengan saudara:

Nama : Nurul Inayah, S.H.

Nim : 17203010010

Semester : IV (Empat)

Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Maret 2019

Pewawancara

Yang Diwawancarai


Nurul Inayah, S.H.


Drs. H. Misbachul Munir, SH.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan Tesis dengan judul “Analisis Putusan Itsbat Nikah Poligami (Studi Terhadap Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA. Bm. Jo. Putusan No.0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr.)” dengan saudara:

Nama : Nurul Inayah, S.H.
Nim : 17203010010
Semester : IV (Empat)
Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Februari 2019

Pewawancara

Yang Diwawancarai



Nurul Inayah, S.H.



Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Subuki, MH.
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo


Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan Tesis dengan judul "Analisis Putusan Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Terhadap Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA. Bm. Jo. Putusan No.0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr.)" dengan saudara:

Nama : Nurul Inayah, S.H.
Nim : 17203010010
Semester : IV (Empat)
Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

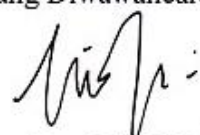
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Maret 2019

Pewawancara


Nurul Inayah, S.H.

Yang Diwawancarai


Drs. Drs. Subuki, MH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 52/Un.02/DS.1/PG.00/ / / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

04 Januari 2019

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwakarta

Di Purwakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN TENTANG ITS BAT NIKAH POLIGAMI (Studi Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/2014/PA. Bm. Jo. No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr).

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : NURUL INAYAH
NIM : 17203010010
Program Studi : Magister Hukum Islam Konsenterasi Hukum Keluarga Islam
Semester : III (Tiga)
Alamat Asal : Aceh Tamiang Aceh
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 13 Sapen Kel. Demangan
Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Purwakarta.


Metode pengumpulan data: melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara Itsbat Nikah Poligami pada Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/2014/PA. Bm. Jo. No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr., yaitu Drs. M. Rusli, SH., MH.

Adapun waktunya mulai tanggal 14 Januari 2019 s/d 28 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(...Nurul Inayah...)



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 52 /Un.02/DS.1/PG.00/ / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

04 Januari 2019

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember

Di Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN TENTANG ITS BAT NIKAH POLIGAMI (Studi Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/2014/PA. Bm. Jo. No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr).

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : NURUL INAYAH
NIM : 17203010010
Program Studi : Magister Hukum Islam Konsenterasi Hukum Keluarga Islam
Semester : III (Tiga)
Alamat Asal : Aceh Tamiang, Aceh
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 13 Sapen Kel. Demangan
Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Jember.

Metode pengumpulan data: melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara Itsbat Nikah Poligami pada Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/2014/PA. Bm. Jo. No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr. Yaitu Drs. H. M. Ijmak, SH., MH.

Adapun waktunya mulai tanggal 14 Januari 2019 s/d 28 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

Nurul Inayah
(... NURUL INAYAH ...)



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-52/Un.02/DS.1/PG.00/ / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

04 Januari 2019

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN TENTANG ITSBAT NIKAH POLIGAMI (Studi Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/2014/PA. Bm. Jo. No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr).

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : NURUL INAYAH
NIM : 17203010010
Program Studi : Magister Hukum Islam Konsenterasi Hukum Keluarga Islam
Semester : III (Tiga)
Alamat Asal : Aceh Tamiang, Aceh
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 13 Sapen Kel. Demangan
Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

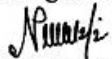
Metode pengumpulan data: melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara Itsbat Nikah Poligami pada Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/2014/PA. Bm. Jo. No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr. Yaitu Drs. H. Agus Bahauddin, M.Hum.

Adapun waktunya mulai tanggal 14 Januari 2019 s/d 28 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(... Nurul Inayah ...)



an Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 52 /Un.02/DS.1/PG.00/ / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

04 Januari 2019

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN TENTANG ITS BAT NIKAH POLIGAMI (Studi Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/2014/PA. Bm. Jo. No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr).

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : NURUL INAYAH
NIM : 17203010010
Program Studi : Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam
Semester : III (Tiga)
Alamat Asal : Aceh Tamiang, Aceh
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 13 Sapen Kel. Demangan
Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Jember
2. Pengadilan Agama Purwakarta
3. Pengadilan Tinggi Agama Semarang
4. Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Metode pengumpulan data: melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara Itsbat Nikah Poligami pada Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/2014/PA. Bm. Jo. No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr., yaitu Drs. H. M. Ijmak, SH., MH. (sekarang Hakim PA Jember), Drs. M. Rusli, SH., MH. (sekarang Hakim PA Purwakarta), Drs. H. Agus Bahauddin, M.Hum. (sekarang Hakim PTA Semarang), dan Drs. Subuki, M.H. (Sekarang Hakim PTA Mataram).

Adapun waktunya mulai tanggal 14 Januari 2019 s/d 28 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau 'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(...Nurul INAYAH...)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/143/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-52/Un.02/DS.1/PN.00/1/2019
Tanggal : 4 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "ANALISIS PUTUSAN TENTANG ITS BAT NIKAH POLIGAMI (STUDI PUTUSAN NO. 0663/PDT.G/2014/PA.BM.JO. NO.0093/PDT.G/2014/PTA.MTR.)" kepada:

Nama : NURUL INAYAH
NIM : 17203010010
No.HP/Identitas : 082274495372/1116054401960001
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Jember, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 14 Januari 2019 s.d 28 Juni 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pajember.net email: pajember@yahoo.co.id
JEMBER 68117

Nomor : W.13-A4/554/HM.01/1/2019
Lamp : -
Perihal : Permohonan Izin Riset

Jember, 15 Januari 2018

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-52/Un.02/DS.1/PG.00/1/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang telah kami terima pada tanggal 10 Januari 2019 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin untuk menerima mahasiswi bernama:

Nama : NURUL INAYAH
NIM : 17203010010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *ANALISA PUTUSAN TENTANG ITSBAT NIKAH POLIGAMI (Studi Putusan No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo. No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)*

dalam melaksanakan pengambilan data untuk penyusunan Tesis di instansi kami.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **Isbat Nikah Poligami**, antara :

PEMOHON I, umur 49, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Pengawas PAI TK/SD), tempat tinggal di Kabupaten Bima, disebut sebagai PEMOHON I;

PEMOHON OO, umur 39, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMP 3 Woha), tempat tinggal di Kota Bima, Kabupaten Bima, disebut sebagai PEMOHON II;

LAWAN

TERMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kabupaten Bima, disebut sebagai TERMOHON;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Permohon II dan Termohon di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register nomor : 0663/Pdt.G/ 2014/PA.Bm., tanggal 28 Mei 2014, telah mengajukan permohonan **Isbat Nikah Poligami** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Desember 1988, bertempat di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, sesuai Kutipan Akta Nikah No. K/1/Pw..o1/447/88, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bima, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I (L) umur 25 tahun, 2. ANAK II, umur 23 tahun, 3. ANAK III (P) umur 18 tahun, dan 4. ANAK IV (P) umur 13 tahun;
3. Bahwa Pemohon I kemudian menikah lagi dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehubungan dengan hal itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I (P) umur 7 tahun, 2. ANAK II (P) umur 6 tahun;
5. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat ijab Kabul yaitu AM (Saudara kandung Pemohon II) sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah adalah : FM dan S, dengan mahar berupa Emas seberat 2 gram tunai;
6. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hendak mengurus Buku Akta Nikah, maka untuk maksud tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan/Putusan dari Pengadilan Agama Bima;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Termohon menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan II tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengajukan permohonan ijin menikah poligami. Selain itu juga agar difikirkan secara matang resiko PNS yang menikah poligami, terutama perempuan yang PNS yang akan menjadi istri kedua atau ketiga; namun upaya tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan II adalah PNS maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk mengurus *Surat izin Poligami dari Pejabat yang berwenang* sampai batas waktu yang telah ditentukan menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, dan oleh Pemohon I telah memberikan keterangan tambahan di persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I pada saat pernikahan poligami dengan Pemohon II, di samping sebagai PNS, juga menjabat sebagai Kasubag. TU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, dan sekarang menjabat sebagai Pengawas PAI TK/SD pada Kemenag Kab, Bima;
- Bahwa pernikahan poligami Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei tahun 2006 yang lalu secara sirri, karena Pemohon I bermaksud meredam dan menjaga perasaan Termohon yang saat itu sedang dalam keadaan sakit, bahkan pernah lumpuh ± 2 bulan, dan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon I menikah poligami dimaksud, *namun persetujuan tersebut hanya dalam bentuk lisan, tidak secara tertulis*;
- Bahwa pada saat pernikahan Poligami secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II masih berstatus gadis dan belum menjadi PNS (Guru Negeri);
- Bahwa pada saat pernikahan poligami dimaksud, Pemohon I telah mempunyai istri bernama FA (Termohon) dan sudah punya anak 4 (empat) orang sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi pernikahan tersebut tetap dilaksanakan;
- Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II juga dengan Termohon tetap harmonis, tidak pernah bercerai, demikian juga anak-anak Pemohon II dengan anak-anak Termohon akur dan harmonis sebagaimana halnya orang bersaudara;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan II di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Pemohon I, Nomor : 5272020708650003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Pemohon II, Nomor : 5272055612750001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi KTP Termohon, Nomor : 5272025403630004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan *Akta Nikah Pemohon I dengan Termohon* yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dengan nomor : K/II Pw.01/447/88, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima, tanggal 17 Desember 1988 (bukti P.4);
5. Asli Surat dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd. 19.08/1/KP.06/1270/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang persetujuan untuk *Isbat Nikah Poligami Pemohon I*, (bukti P.5);
6. Asli Surat dari Kepala SMPN 3 Woha, Kabupaten Bima, Nomor : 04/130.21.420/ H.SMP/KP/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang *persetujuan untuk Isbat Nikah Poligami Pemohon I*, (bukti P.6);
7. Asli *Surat Rekomendasi* dari Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Bima, Nomor : 04/130.21.420/ H.SMP/KP/2014, tanggal 15 Juli 2014, tentang *persetujuan untuk Isbat Nikah Pemohon I*, (bukti P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pernyataan Termohon (FA), tanggal 26 Juli 2014;

Bahwa para Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi KTP Pemohon I, Pemohon II dan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama M, Pemohon II bernama IM, dan Termohon bernama FA, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkara ini termasuk *Kompetensi relatif* Pengadilan Agama Bima, maka para Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dengan Termohon, telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan kewenangan mutlak (*kompetensi absolute*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan Isbat Nikah Poligami, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atau atasannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan poligami menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, terutama mengenai konsekuensi hukum bagi calon istri yang PNS untuk menjadi istri kedua, atau ketiga, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Permohon II telah membenarkan dirinya sudah menikah di bawah tangan dengan Pemohon I sejak 8 (delapan) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2006 dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak, Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II juga mengetahui bahwa Pemohon I saat itu sudah punya seorang istri (*Termohon*) dan punya 4 orang anak;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon menuntut agar pernikahannya disahkan dengan alasan karena pernikahannya belum tercatat, sehingga sampai saat ini pernikahannya belum memiliki Buku Nikah, serta anak-anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran, juga Termohon sekarang sudah merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan dalam hukum islam untuk menikah karena Pemohon II saat itu belum menjadi PNS, berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat diajukan permohonan Isbat Nikah Poligami oleh Pemohon I dan II, telah ternyata di depan sidang Pemohon II menjelaskan bahwa dirinya adalah PNS (Guru SMPN 3 Woha) Kabupaten Bima, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 secara tegas menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Oleh karenanya Pasal tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Isbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prihal kedudukan Pemohon II sebagai istri kedua, mengaku bahwa ia telah melangsungkan pernikahannya dengan M, (Pemohon I) pada tanggal 26 Mei 2006 di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama AM, disaksikan oleh FM dan S, dengan mahar berupa Emas seberat 2 gram tunai;

Menimbang, bahwa sekalipun untuk dan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung dan terjadi pada tanggal 26 Mei 2006, akan tetapi di persidangan Pemohon menyatakan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti yuridis formal dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sekalipun antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melakukan pernikahan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan, akan tetapi pernikahan itu tidak didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, lagi pula pernikahan tersebut terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut hukum, segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, haruslah tunduk kepada segala sesuatu aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya segala bentuk perkawinan yang tidak tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut (*Vide Pasal 64 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*), maka penafsiran secara *a kontrario*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan sertidak-tidaknya “*pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum*”;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), menyebutkan bahwa “..... Pengadilan dimaksud dalam Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- b. istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan ;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat mengajukan permohonan dimaksud, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di mana pada saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan pertamanya dengan Termohon, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, tidak pernah bercerai sampai sekarang, lagi pula Pemohon tidak dapat membuktikan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama Bima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II termasuk tindakan pelanggaran dan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan II dan Termohon serta alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk *isbat nikah poligami* tidak mempunyai alasan hukum yang kuat sebagaimana kehendak Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jis Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena bukti tertulis berupa Asli Surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd. 19.08/1/KP.06/1270/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang persetujuan untuk *Isbat Nikah Poligami Pemohon I*, (bukti P.5); Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Kepala SMPN 3 Woha, Kabupaten Bima, Nomor : 04/ 130.21.420/ H.SMP/KP/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang *persetujuan untuk Isbat Nikah Poligami Pemohon I, (bukti P.6)*; Asli *Surat Rekomendasi* dari Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Bima, Nomor : 04/130.21.420/H.SMP/KP/2014, tanggal 15 Juli 2014, tentang *persetujuan untuk Isbat Nikah Pemohon I, (bukti P.7)*; dan Asli Surat Pernyataan Termohon (FA), tanggal 26 Juli 2014; ***semua alat bukti tersebut dibuat pada bulan Juni dan Juli tahun 2014, sedangkan pernikahan Poligami para Pemohon dilangsungkan 8 (delapan) tahun yang lalu yaitu pada bulan Mei tahun 2006; Artinya alat bukti yang diajukan para Pemohon ternyata dibuat 8 tahun kemudian setelah terjadinya hukum / peristiwa poligami yang diminta untuk diisbatkan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tidak terbukti menurut hukum, dan permohonan Pemohon untuk *isbat nikah poligami* tidak ada dasar hukum secara normatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk *Isbat Nikah Poligami* adalah tidak relevan dengan maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua Undang-undang dan Peraturan yang berlaku serta 'hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H. oleh kami : Drs. M. RUSLI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. IJMAK, SH., MH. dan Dra. ULIN NA'MAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dan dibantu oleh Dra. NURKHAIRIAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. M. RUSLI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

Drs. H. M. IJMAK, SH., MH.

Dra. ULIN NA'MAH, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. NURKHAIRIAH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 60.000,-
- Biaya Panggilan Rp 255.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 356.000,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHTAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0093/Pdt.G/2014



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah Poligami pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. MAHMUD, SH bin H. M. SA'ID, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Pengawas PAI TK/SD), tempat tinggal di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, disebut semula sebagai Pemohon I sekarang **"Pembanding I"** ;

ICO, S.Pd. binti MUHAMMAD, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMP 3 Woha), tempat tinggal di Lingkungan Sadia 1, RT.001, RW.001, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, disebut semula sebagai Pemohon II sekarang **"Pembanding II"**;

LAWAN

FARIDAH binti ALWI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal di RT.005, RW. 002,

Hal 1 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014



Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, disebut semula sebagai Termohon sekarang “**Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 pihak Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Juli 2014;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 11 Agustus 2014 yang diajukan oleh pihak Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II dan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2014 yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm., tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Bima, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan permohonan Isbat Nikah Poligami, seharusnya memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atau atasannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I/Pembanding I, Pemohon II/Pembanding II dan Termohon/Terbanding mengenai ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan poligami

Hal 3 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014



menurut ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, terutama mengenai konsekuensi hukum bagi calon isteri yang berstatus PNS untuk menjadi isteri kedua, atau ketiga, namun upaya tersebut tidak berhasil, Para Pemohon/Para Pembanding tetap mempertahankan permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I /Pembanding I dan Pemohon II / Pembanding II memohon agar pernikahan mereka berdua disahkan dengan alasan karena pernikahannya belum tercatat, sehingga sampai saat ini pernikahannya belum memiliki bukti Buku Nikah, Termohon/ Terbanding sebagai isteri pertama Pemohon I / Pembanding I sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II, juga tidak ada halangan dalam hukum syar'i untuk menikah karena Pemohon II / Pembanding II waktu itu berstatus gadis dan disamping itu pada saat itu Pemohon II / Pembanding II belum menjadi PNS ;

Menimbang, bahwa Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II, mengaku telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 05 Mei 2006 di Desa Keli, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II/Pembanding II bernama Aswad bin Muhammad, disaksikan oleh Drs. H. FITRAH MALIK dan Drs. SAMSUDIN, dengan mahar berupa Emas seberat 2 (dua) gram tunai;

Menimbang bahwa antara Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II tersebut telah melakukan pernikahan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan, hanya saja pernikahan tersebut belum didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan



Agama setempat, juga pernikahan tersebut terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan sirri atau nikah dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, telah memenuhi syarat rukunnya menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing itu, hal ini terjadi pada sebagian masyarakat muslim yang masih berpegang teguh kepada perspektif Fiqih tradisional. Menurut pemahaman ini perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak perlu surat nikah, secara agama perkawinan ini sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa jalur nikah sirri telah menjadi pilihan bagi yang bermaksud beristeri lebih dari satu orang melalui cara pengesahan nikah (itsbat nikah), dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Hakim perlu mengkaji secara mendalam terhadap fakta-fakta dalam persidangan sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap nikah sirri melalui Itsbat nikah ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang bisa muncul dari adanya itsbat nikah adalah mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah sirri ataupun isteri yang dinikahi secara resmi dan tercatat dan anak-anaknya. Hakim menurut Undang-Undang tidak boleh menolak suatu perkara

Hal 5 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014



yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas, melainkan harus menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kasus itsbat nikah poligami dalam perkara a quo menurut pendapat Hakim tingkat banding belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu menjadi peluang Hakim untuk berupaya menemukan hukum dengan jalan menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum syar'i sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang berarti atau paling tidak sedikit menyimpangi dari peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan kemaslahatan keluarga yang bersangkutan. Bahwa fakta dalam persidangan Hakim tidak dapat menafikan keabsahan akad nikah yang telah dilakukan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya (Islam) dan kepercayaannya itu untuk memenuhi keadilan hukum sekaligus keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan menjadi masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Hakim harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini dengan tujuan agar proses itsbat nikah tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Berangkat dari permasalahan tersebut maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan itsbat nikah harus mengikuti petunjuk yang berkaitan permohonan Itsbat nikah yang diajukan sepihak maka ketentuannya adalah sebagai berikut: Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah tersebut diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara seperti halnya dalam perkara aquo ini. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 144) ;

Menimbang, bahwa adanya itsbat nikah adalah bagai pisau bermata dua, disatu sisi adanya itsbat nikah adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya, akan tetapi disisi lain juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktek nikah siri, karena seolah-olah nikah siri bisa dikompromikan, yang apabila butuh dan ingin tinggal mensahkan perkawinannya ke Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan Itsbat nikah, akhirnya status pernikahannya pun menjadi sah dimata negara. Maka bagi Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara a quo dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan, apalagi keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut ketentuan hukum syar'i, telah mempunyai dua orang anak, Termohon/ Terbanding tidak keberatan dan setuju untuk dimadu dan Termohon/ Terbanding dalam keadaan sakit, akan lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya bagi semua pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan

Hal 7 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Namun demikian sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan dan keadilan bagi keluarga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama (Islam), Majelis Hakim tingkat banding belum menemukan satu pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dalam kasus ini dengan pertimbangan di atas Hakim dapat mengitsbatkan perkawinan sirrinya. Kalau pihak pemohon didudukkan oleh Hakim sebagai pihak yang bersalah, apakah yang bersalah akan terus menjadi bersalah tidak ada lembaga taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah anak-anak yang lahir hasil dari pernikahan sirri akan selamanya menanggung beban ketidak jelasan status hukumnya baik di masyarakat maupun dimata negara, apakah terhapus selamanya hak-hak keperdataan yang berhubungan dengan ayah kandungnya hasil perkawinan sirri seperti hak perwalian dan hak waris dan lain-lain. Secara kasuistis Hakim juga harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat. Hasil seminar sehari “Hukum keluarga Nasional antara **Realitas dan Kepastian Hukum**” yang telah diulas pada sampul belakang majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 286 edisi September 2009 sebagai berikut :



Menimbang bahwa fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut “**kawin Sirri**” dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah realita, alasannya mulai dari mahal nya biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan. Menyikapi persoalan ini, pada tanggal 1 Agustus 2009 di **hotel Red Top Jakarta**, diadakan Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), diperoleh pernyataan para pakar hukum yang amat mengejutkan diantaranya pernyataan: **1. Prof. Dr.Bagir Manan, SH**, yang menyimpulkan bahwa: “ **pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri**”.**2. Prof.DR.Mahfud MD, SH**, yang menyatakan bahwa “ **perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945**. **3. DR.H.Harifin A, Tumpa,SH., MH**. berpandangan bahwa “ **kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan**”.{ *H.Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag) : Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7* } ;

Menimbang bahwa syarat-syarat izin beristeri lebih dari satu (poligami) menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

- (1) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Pasal 4 ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila ; a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

Hal 9 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014



disembuhkan. c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari isteri pertama; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka; Pasal 5 (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) angka 1 pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II utamanya surat-surat bukti yang berkaitan dengan persyaratan nikah poligami sebagaimana yang termuat dalam Bendel A perkara a quo maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.04 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/I/Pw.01/447/88 tertanggal 7 Desember 1988 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Pemohon I/Pembanding I dengan Termohon/ Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Desember 1988 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P. 05 berupa asli surat persetujuan untuk itsbat nikah Nomor Kd.19.08/1/KP.06/1270/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kantor Kota Bima maka telah terbukti bahwa Pemohon I/ Pembanding I sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai isteri bernama Faridah binti Alwi telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan itsbat Nikah dengan isteri keduanya bernama Ico, S.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.06 berupa Asli Surat Persetujuan Untuk Itsbat Nikah Nomor 04/130.21.420/H.SMP/KP/2014 tanggal 5 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Woha terbukti bahwa Pemohon II/ Pembanding II sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 3 Woha Kabupaten Bima) telah mendapatkan persetujuan dari atasannya untuk mengajukan pengesahan nikah sebagai isteri ke II dari Drs. Mahmud, SH yang menikah pada tanggal 5 Mei 2006 sebelum Pemohon II/ Pembanding II menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan pertimbangan karena Faridah binti Alwi sebagai isteri ke I dari Drs. Mahmud, SH memberikan persetujuan dan tidak keberatan untuk disahkan pernikahan Drs. Mahmud, SH dengan perempuan bernama Ico, S.PD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P. 07 berupa Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Nomor 004/301/01.1/A/2014 tanggal 15 Juli 2014 perihal Rekomendasi ternyata bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Bima menyatakan tidak keberatan dalam merekomendasikan pernikahan Pemohon II/Pembanding II sebagai isteri ke II dari Pemohon I/ Pembanding I ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.08 berupa Asli Surat Pernyataan Termohon/Terbanding tertanggal 26 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Faridah binti Alwi (Termohon/Terbanding) terbukti bahwa Termohon menyatakan memberikan ijin / menyetujui kepada

Hal 11 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya Drs. Mahmud, SH untuk melaksanakan poligami dan sekaligus itsbat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ico, S.Pd yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 5 Mei 2006 dengan alasan bahwa sejak tahun 2003 sampai 2006 Termohon/Terbanding sering sakit dan pernah mengalami pendarahan sejak umur bayi dalam kandungan lebih kurang 5 bulan sehingga bayi gugur pada saat pendarahan dan pernah mengalami sakit lumpuh lebih kurang 2 bulan dan sejak itu fisik Termohon / Terbanding semakin turun dan tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa harus diakui bahwa pernikahan Pemohon I/ Pembanding I dengan Pemohon II/ Pembanding II tersebut di atas telah terjadi dan telah dilaksanakan dengan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku in casu ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkara a quo adalah perihal itsbat nikah poligami yaitu permohonan pernyataan sahnya perkawinan poligami yang sudah terjadi dimana perkawinan tersebut karena satu dan lain hal tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat-surat bukti bertanda P.05, P.06, P.07 dan P.08 sebagaimana telah dipertimbangkan



di atas dapat dijadikan acuan dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, satu sisi ada penyelundupan perkara dengan mengajukan perkara itsbat nikah tanpa melibatkan isteri terdahulu, padahal sebenarnya pernikahannya poligami. Di sisi lain, Hakim perlu memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh itsbat nikah sebagai solusinya. Hakim bebas memberikan pertimbangan yang pada akhirnya dari fakta-fakta dalam persidangan mengabulkan perkara a quo. Berhubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terhadap perkara isbat nikah poligami Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM memberikan suatu sistem pertimbangan Hakim. Hakim dalam memutuskan perkara a quo memperhatikan dengan objektif, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni mempertimbangkan berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Terhadap perkara a quo berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II dan Termohon/Terbanding dan dengan pertimbangan meskipun syarat-syarat poligami tidak seluruhnya terpenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 KHI, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, beserta alasan Termohon/Terbanding tidak keberatan dimadu, tidak didzalimi, tidak karena paksaan suami/Pemohon I/Pembanding I, keduanya telah mempunyai dua orang anak dan keduanya juga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik

Hal 13 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014



menurut hukum syar'i maupun menurut peraturan-perundang-undangan untuk berpoligami, maka itsbat nikah poligami dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara permohonan itsbat nikah poligami a quo Majelis Hakim tingkat banding tidak bermaksud mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dengan isteri kedua tetapi apa yang diputuskan semata-mata sebagai suatu langkah darurat sebatas untuk melindungi status anak-anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum syar'i adalah sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam Kitab l'anatuth Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذ كرضحته وشروطه من
نحوولي وشاهدى عدول

Artinya : Didalam menda'wa telah menikah dengan seorang wanita maka harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam tersebut di atas dikarenakan perkara permohonan itsbat nikah a quo adalah perkara kontentiosa, dimana pada pemeriksaan tingkat pertama Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa saksi-saksi, namun demikian hal ini tidak menjadi hambatan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar mengadili sendiri mengabulkan permohonan Pemohon I / Pemanding



I dan Pemohon II/ Pembanding II karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam perkara permohonan itsbat nikah ini dianggap terbukti dengan tidak adanya bantahan oleh Termohon/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam tersebut di atas Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II tetap harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti menyebutkan siapa yang menjadi wali nikahnya dan siapa yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut, dan hal ini telah dijelaskan dan disebutkan oleh Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II dengan secara terperinci dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan ini Majelis Hakim tingkat banding perlu juga mengetengahkan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

جلب المنعة ودفع الضرر

Artinya : “Menarik/mendapatkan manfaat dan menolak/mencegah kemandlaratan”;

Kaitannya dengan perkara a quo adalah bahwa kaidah tersebut harus dimaknai dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim wajib mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkannya itu akan dapat memberikan maslahat dan manfaat dan sekaligus menolak/mencegah timbulnya kemandlaratan. Dengan mengabulkan permohonan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II maka akan memberikan manfaat antara lain kejelasan dan kepastian status pernikahan mereka, kejelasan dan kepastian status anak-anak yang dilahirkan akibat pernikahan PemohonI/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II sehingga anak-anak tersebut dan hak-haknya akan terlindungi (Vide Qaidah Qaidah Fiqih karangan Drs. H. Asjmuni A. Rahman, Bulan Bintang halaman 14 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Hal 15 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 ayat (2), pasal 34 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipandang perlu untuk memerintahkan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II /Pembanding II agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H ;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan poligami (Istbat Nikah Poligami) antara **Pemohon I : Drs. Mahmud, S.H bin H.M. Said dengan Pemohon II : ICO, SPd binti Muhammad** yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut ;
 4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding I/Pemohon I dan Pembanding II/ Pemohon II untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H., oleh kami **Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum.** dan **Drs.SUBUKI, M.H.**

Hal 17 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **HAIRIYAH, S.H.** sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. SUBUKI, MH.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs.H. MISBACHUL MUNIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HAIRIYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses/Adm lainnya Rp.139.000,-
 - Jumlah..... Rp.150.000'-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Agama
Mataram
Panitera

H.A.JAKIN KARIM, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

Hal 19 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Nurul Inayah, S.H.
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Dayah Tanoh, 04 Januari 1996
Alamat Asal : Dusun Melur Desa Bukit Rata,
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, Aceh.
Alamat Tinggal : Jl. Bimokurdo No. 13, Sapeh, Demangan,
Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Email : nurulinayah3355@gmail.com
No. HP : 082274495372

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SDN 2 Bukit Tempurung Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh.	2001-2007
SMP	MTs Ulumul Qur'an Langsa, Aceh.	2007-2010
SMA	MAS Ulumul Qur'an Langsa, Aceh.	2010-2013
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	2013-2017

C. Latar Belakang Pendidikan Non-Formal

2007-2013 : Pesantren Madrasah Ulumul Qur'an
Langsa, Aceh.
2017 : Kursus Bahasa Arab di JCC Yogyakarta.

D. Pengalaman Organisasi

2012-2013 : Ketua Osis II Madrasah Ulumul Qur'an
Langsa, Aceh.
2015-2016 : Anggota Penelitian dan Pengembangan
(LITBANG) Pusat Studi dan Konsultasi
Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2013-2015 : Bendahara Organisasi Santri dan Ex-Santri
Madrasah Ulumul Qur'an Langsa
(ORALEXISMUQ) Kabulat Yogyakarta.
2015-2018 : Sekretaris Persatuan Mahasiswa Aceh
Tamiang Yogyakarta (PERMATA).

G. Penghargaan

2017 : Wisudawan/Wisudawati dengan Predikat
Terbaik dan Tercepat Periode III Tahun
Akademik 2016/2017.